

**PERSEPSI DAN SIKAP PETANI TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN
KEMASYARAKATAN DI DESA PELA KECAMATAN MONTA KABUPATEN
BIMA**

***FARMERS' PERCEPTIONS AND ATTITUDES TOWARDS COMMUNITY FOREST
MANAGEMENT IN PELA VILLAGE, MONTA SUB-DISTRICT, BIMA DISTRICT***

Fadlia Rahmati*, Johan Bachry, Siti Nurjannah

Program Studi Agribisnis Universitas Mataram, Jl. Majapahit No 37, Mataram, Indonesia

*Email Penulis korespondensi: fadliarahmati10@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui persepsi petani terhadap pengelolaan hutan kemasyarakatan di Desa Pela Kecamatan Monta Kabupaten Bima dan (2) Mengetahui sikap petani terhadap pengelolaan hutan kemasyarakatan di Desa Pela Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik survey dan wawancara langsung. Unit analisis dalam penelitian ini adalah anggota Kelompok Tani Hutan yang berperan serta dalam pengelolaan hutan di Desa Pela. Penentuan daerah penelitian menggunakan *purposive sampling* sebagai sampel yakni Desa Pela. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa: (1) Persepsi petani terhadap pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Pela berada pada kategori Baik. Petani menyambut positif terhadap keberadaan HKm di Desa Pela. Hal tersebut menjadikan petani sangat kooperatif dan bersedia untuk diajak kerjasama untuk mengelola HKm pada Desa Pela. (2) Sikap petani terhadap pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Pela berada pada kategori Setuju. Keberadaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Pela memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial dan ekonomi petani dengan fasilitas yang tersedia guna meningkatkan fungsi dan manfaat pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dalam menunjang kegiatan pertanian di Desa Pela.

Kata Kunci: Persepsi, Sikap, Hutan Kemasyarakatan.

ABSTRACT

This study aims to (1) Identify farmers' perceptions of community forest management in Pela Village, Monta Subdistrict, Bima Regency and (2) Identify farmers' attitudes towards community forest management in Pela Village, Monta Subdistrict, Bima Regency. The research method used in this research is descriptive method. While data collection techniques using survey techniques and direct interviews. The unit of analysis in this study was members of the Forest Farmers Group who participated in forest management in Pela Village. Determination of the research area using *purposive sampling* as a sample, namely Pela Village. The data sources used in this research are primary data and secondary data. The types of data used in this research are quantitative data and qualitative data. The results show that: (1) Farmers' perceptions of Community Forest management in Pela Village are in the Good category. Farmers positively welcomed the existence of HKm in Pela Village. This makes farmers very cooperative and willing to work together to manage HKm in Pela Village. (2) Farmers' attitudes towards Community Forest management in Pela Village are in the Agree category. The existence of Community Forests in Pela Village has a positive impact on the social and economic life of farmers with facilities available to improve the functions and benefits of Community Forest management in supporting agricultural activities in Pela Village

Keywords: Perception, Attitude, Community Forest.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara besar yang mengalokasikan 120,6 juta hektar atau sekitar 63 persen dari luas daratannya sebagai Kawasan Hutan. Kawasan daratan sisanya berupa areal bukan kawasan hutan yang dikenal sebagai Areal Penggunaan Lain (APL). Kawasan Hutan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) fungsi, yaitu: Hutan Produksi (HP) meliputi areal seluas 68,8 juta hektar atau 57 persen dari Kawasan Hutan; Hutan Konservasi (HK) meliputi areal seluas 22,1 juta hektar atau 18 persen dari Kawasan Hutan (dengan tambahan 5,3 juta hektar dari kawasan konservasi perairan); dan Hutan Lindung yang memiliki fungsi perlindungan daerah aliran sungai (DAS) dan meliputi areal seluas 29,7 juta hektar atau 25 persen (Agung, dkk, 2018).

Hutan Kemasyarakatan (HKm) menjadi salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan untuk menekan laju deforestasi di Indonesia dengan melibatkan masyarakat di samping Hutan Desa dan Hutan Tanaman Rakyat. Banyak pihak memandang kebijakan ini sebagai pengakuan negara terhadap pengelolaan hutan oleh rakyat yang selama ini terabaikan, namun mampu menjaga kelestarian alam dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Bagi masyarakat, hutan tak hanya memiliki makna ekologis, tetapi juga sosial, budaya dan ekonomi (Khaeruddin, 2018).

Dalam pengelolaan hutan persepsi petani perlu diketahui agar dapat mewujudkan motivasi dan sikap aktif dari petani dalam mengelola hutan setempat sehingga mampu untuk menjaga keseimbangan alam disekitarnya. Untuk lebih menjamin keberhasilan pengelolaan hutan bukan hanya dibutuhkan keseragaman (homogen) dalam hal angkatan kerja saja tetapi juga keseragaman persepsi terhadap hutan, karena persepsi akan berpengaruh pada pembentukan pola pikir (mindset) dan sikap petani. Persepsi merupakan kesan yang pertama untuk mencapai suatu keberhasilan dan dari persepsi seseorang akan mempengaruhi proses belajar (minat) dan mendorong individu untuk melaksanakan sesuatu (motivasi) untuk belajar sehingga membentuk sikap seseorang terhadap fenomena yang sedang terjadi (Ali *et al*, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui persepsi petani terhadap pengelolaan hutan kemasyarakatan. (2) Untuk mengetahui sikap petani terhadap pengelolaan hutan kemasyarakatan.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik survey dan wawancara. Unit analisis dalam penelitian ini adalah petani yang berperan serta dalam pengelolaan hutan di Desa Pela. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara "Purposive Sampling" yaitu di Desa Pela Kecamatan Monta Kabupaten Bima, sedangkan penentuan jumlah responden dilakukan secara *Sensus* dengan mengambil pengurus dan semua anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Wadu Me'e. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Analisis data dalam penelitian dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh melalui hasil kuisioner dan wawancara kemudian dideskripsikan dengan cara menggunakan analisis persentase untuk menghitung persentase jawaban yang diberikan responden. Data yang dikumpulkan dari penelitian ini terutama data yang diperoleh dari rekapitulasi responden kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif.

Untuk mengetahui persepsi dan sikap petani terhadap pengelolaan hutan kemasyarakatan maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan metode skoring sebagai berikut:

$$\text{Skor maksimum} = \Sigma \text{ Item penilaian} \times \Sigma \text{ Skor Tertinggi}$$

$$\text{Skor minimum} = \Sigma \text{ Item penilaian} \times \Sigma \text{ Skor Terendah}$$

Selanjutnya untuk mengetahui interval skor dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Interval Skor} = \frac{\text{Skor Maksimum} - \text{Skor Minimum}}{\text{Jumlah Kategori}}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Umur Responden

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata responden kisaran pada umur produktif. Untuk lebih jelasnya adapun sebaran responden menurut kisaran umur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur pada anggota Kelompok Tani Hutan Wadu Me'e Di Desa Pela Kecamatan Monta Kabupaten Bima Tahun 2022.

No	Kisaran umur (Tahun)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	27 – 41	12	28
2.	42 – 56	26	60
3.	>56	5	12
Jumlah	43	43	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa umur responden terendah yaitu diatas 56 tahun sedangkan umur responden tertinggi yaitu kisaran umur 42- 56 tahun. Rata-rata umur responden adalah 40 tahun keatas, jadi dapat dikatakan bahwa sekitar 88% dari jumlah responden berada pada usia produktif.

Jenis Kelamin Responden

Jumlah responden laki-laki dan perempuan pada penelitian ini jauh berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Anggota Kelompok Tani Hutan Wadu Me'e Di Desa Pela Kecamatan Monta Kabupaten Bima 2022.

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Laki-laki	38	88
2.	Perempuan	5	12
Jumlah		43	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah responden laki-laki adalah sebanyak 88% atau 38 orang. Sedangkan responden perempuan sebanyak 12% atau 5 orang. Pada umumnya yang memiliki lahan pertanian adalah laki-laki, sedangkan perempuan biasanya hanya menjadi tenaga kerja tambahan dalam kegiatan berusahatani. Hal ini dapat dibuktikan saat dilokasi penelitian bahwa mayoritas perempuan lebih banyak mengerjakan pekerjaan rumah atau mengolah keuangan rumah tangga.

Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat pendidikan yang dimiliki responden akan menunjukkan tingkat pengetahuan serta wawasan yang luas dalam pemahamannya terhadap pengelolaan hutan. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat responden dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden Kelompok Tani Hutan Wadu Me'e Desa Pela Kecamatan Monta Kabupaten Bima Tahun 2022.

No.	Tingkat pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Tidak Sekolah	5	12
2.	Tidak Tamat Sekolah	1	2
3.	Tamat SD	5	12
4.	Tidak Tamat SMP	5	12
5.	Tamat SMP	12	28
6.	Tidak Tamat SMA	9	21
7.	Tamat SMA	5	12
8.	Perguruan Tinggi	1	2
Jumlah		43	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden terbanyak berada pada tamatan SMP sebesar 28% atau sebanyak 12 responden dan tingkatan pendidikan paling sedikit berada pada tamatan perguruan tinggi yaitu sebesar 2% atau 1 responden. Pada dasarnya, tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap cara berpikir seseorang dalam menyimpulkan sesuatu. Namun pada penelitian ini tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi dan sikap petani terhadap pengelolaan hutan.

Jenis Pekerjaan Responden

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden memiliki pekerjaan utama dan sampingan. Jenis pekerjaan responden sebagian besar adalah petani baik pada jenis pekerjaan utama maupun sampingan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan pada Kelompok Tani Hutan Wadu Me'e Desa Pela Kecamatan Monta Kabupaten Bima 2022.

No.	Uraian	Pekerjaan Utama		Pekerjaan Sampingan	
		Jumlah (orang)	Persentase (%)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Petani	39	88	4	45
2.	Buruh Tani	-	-	3	27
3.	Supir	2	5	-	-
4.	IRT	-	-	4	27
5.	Ojek	-	-	1	2
6.	Honoror	1	2	-	-
7.	Penjual Ikan	1	2	-	-
Jumlah		43	100	12	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden memiliki pekerjaan yang terdiri dari 2 (dua) macam pekerjaan yaitu pekerjaan utama dan pekerjaan sampingan. Responden yang memiliki pekerjaan utama sebagai petani yaitu sebesar 88% dan pada pekerjaan sampingan sebesar 45%. Data di atas menunjukkan sebagian besar responden bekerja pada bidang pertanian karena berdasarkan data tentang jumlah penduduk Desa Pela dari total penduduk sebanyak 2,948 jiwa dengan status pekerjaan sebagai petani sebanyak 814 orang.

Luas Lahan Responden

Luas lahan petani adalah areal kerja petani yang dinyatakan dalam satuan Hektar Are (Ha). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas petani memiliki lahan seluas 2 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Luas Lahan pada Kelompok Tani Hutan Wadu Me'e Desa Pela Kecamatan Monta Kabupaten Bima 2022.

No.	Luas Lahan (Ha)	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1.	2	41	95
2.	>2	2	5
Jumlah		43	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki lahan seluas 2 Ha. Luas penguasaan lahan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kegiatan berusahatani, luas lahan yang dimiliki petani akan berpengaruh terhadap persepsi dan sikap petani terhadap pengelolaan hutan kemasyarakatan.

Status Lahan Responden

Status kepemilikan lahan yang dikelola petani pada kawasan Hutan Kemasyarakatan Desa Pela adalah Hak Pakai. Berdasarkan pasal 41 ayat (1) UUPA, Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara

atau tanah milik orang lain. Hak pakai ini timbul berdasarkan keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya. Hak Pakai pada lahan Hutan Kemasyarakatan kawasan Pela berlaku selama 35 tahun dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun dalam skema hutan kemasyarakatan dengan bentuk perhutanan sosial, melalui surat keputusan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan yang tertuang dalam SK (surat keputusan) nomor 1.

Pengalaman Berusahatani Responden

Pengalaman yang dimaksud adalah lamanya petani melakukan kegiatan berusahatani. Secara umum, rata-rata petani memiliki pengalaman selama 15-45 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman berusahatani yang dimiliki petani sudah cukup lama dalam mengelola usahatannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Berusahatani pada Kelompok Tani Hutan Wadu Me'e Desa Pela Kecamatan Monta Kabupaten Bima 2022.

No.	Pengalaman Berusahatani	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1.	<15	12	28
2.	15-45	30	70
3.	>45	1	2
Jumlah		43	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa kisaran pengalaman berusahatani responden terbanyak adalah 15-45 tahun atau sebanyak 30 responden (70%), pengalaman berusahatani paling sedikit yaitu pada kisaran >45 tahun hanya ada 1 responden (2%) dan pada kisaran <15 tahun sebanyak 12 orang (28%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa petani anggota kelompok tani Wadu Me'e memiliki pengalaman yang cukup dalam berusahatani.

Persepsi Petani Terhadap Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan

Persepsi dalam pengkajian ini terdiri dari empat indikator yaitu ketetapan areal kerja HKm, pemberian izin, rencana kerja pengelolaan HKm dan pembinaan. Setiap responden memiliki jawaban yang hampir sama dalam mempersepsikan pengelolaan hutan kemasyarakatan. Selanjutnya responden diminta memberikan jawaban atau respon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, lalu dilakukan perhitungan jumlah skor pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kategori tingkat persepsi dibagi menjadi 3 yaitu: baik, kurang baik dan tidak baik.

Berikut ini disajikan hasil capaian skor Persepsi Petani Terhadap Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Di Desa Pela Kecamatan Monta. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Persepsi Petani Terhadap Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Di Desa Pela Kecamatan Monta Kabupaten Bima 2022.

No.	Indikator Persepsi	Capaian Skor
1.	Ketetapan areal kerja HKm	9
2.	Pemberian izin	12
3.	Rencana kerja pengelolaan HKm	9
4.	Pembinaan	12
Jumlah		42
Kategori		Baik

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan penjumlahan skor pertanyaan untuk persepsi petani terhadap pengelolaan Hutan Kemasyarakatan didapatkan skor sebanyak 42 yang artinya persepsi petani berada pada kategori baik. Petani telah memiliki persepsi yang benar terhadap pengelolaan hutan kemasyarakatan dengan mendukung keberadaannya dan pengelolaannya. Pernyataan tersebut didukung karena petani telah mengetahui fungsi utama keberadaan hutan kemasyarakatan dan petani memahami bahwa keberadaan hutan kemasyarakatan memberikan dampak positif terhadap lingkungannya.

Ketetapan Areal Kerja HKm

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi petani terhadap ketetapan areal kerja yang meliputi: keberadaan HKm, pembentukan dan penguatan kelompok tani dan ketetapan areal kerja HKm berada pada kategori Baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8. Persepsi Petani Terhadap Penetapan Areal Kerja HKm Di Desa Pela Kecamatan Monta Kabupaten Bima 2022.

No.	Penetapan Areal Kerja Hkm	Kategori						Total	
		Baik (3)		Kurang Baik (2)		Tidak Baik (1)		Jmlh	%
		Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%		
1.	Keberadaan Hkm	43	100	-	-	-	-	43	100
2.	Pembentukan Dan Penguatan Kelompok Tani	38	88	5	12	-	-	43	100
3.	Penetapan Areal Kerja Hkm	32	74	11	26	-	-	43	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebesar 100% atau 43 responden menyambut positif terhadap keberadaan HKm di Desa Pela. Petani berharap bahwa program Hutan Kemasyarakatan memberikan dampak positif bagi anggota kelompok tani yaitu berupa peningkatan jumlah pendapatan yang diiringi dengan peran aktif anggota kelompok tani

dalam mengelola hutan. Dampak positif dalam partisipasi aktif anggota kelompok tani dapat berupa peningkatan pendapatan usahatani yang signifikan dan berkelanjutan sehingga sehingga dapat menunjang kebutuhan ekonomi rumah tangga petani dengan tetap melaksanakan prinsip kelestarian hutan. Selain berdampak positif bagi perekonomian petani, keberadaan HKM juga memberi dampak positif bagi anggota kelompok tani dalam memahami fungsi dan tujuan Hutan Kemasyarakatan dimana menjaga kelestarian hutan merupakan tanggung jawab petani sebagai pengelola langsung pada kawasan hutan tersebut.

Pada indikator persepsi petani terhadap pembentukan dan penguatan kelompok tani yaitu sebesar 88% atau 38 responden mengatakan bahwa keberadaan kelompok tani bisa menjadi wadah untuk belajar mengajar bagi anggota kelompoknya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta sikap terhadap tumbuh kembangnya kemandirian dalam kegiatan berusahatani dengan produktivitas yang meningkat menjadikan pendapatan bertambah dan menjadikan kehidupan lebih sejahtera.

Pada indikator persepsi petani terhadap penetapan areal kerja HKM yaitu sebesar 74% atau 32 responden meyakini bahwa petani mengerti dan memahami tentang manfaat dari hutan kemasyarakatan sehingga petani sangat kooperatif dan bersedia untuk diajak berdiskusi mengenai penetapan areal kerja. Manfaat terbentuknya areal kerja HKM yang dapat dirasakan langsung oleh petani yaitu manfaat secara sosial dan ekonomi yang beriringan dengan rencana-rencana strategis yang dibuat terhadap penetapan areal kerja HKM.

Pemberian Izin

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi petani terhadap pemberian yang meliputi: ketetapan hukum, pemberian izin, hak dan kewajiban dan sanksi pelanggaran berada pada kategori Baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9. Persepsi Petani Terhadap Pemberian Izin Pengelolaan HKM Di Desa Pela Kecamatan Monta Kabupaten Bima 2022.

No.	Pemberian Izin	Kategori						Total	
		Baik (3)		Kurang Baik (2)		Tidak Baik (1)		Jmlh	%
		Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%		
1.	Ketetapan Hukum	27	63	16	37	-	-	43	100
2.	Masa Berlaku Izin	28	65	15	35	-	-	43	100
3.	Hak Dan Kewajiban	28	65	15	35	-	-	43	100
4.	Sanksi Pelanggaran	29	67	14	33	-	-	43	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa persepsi petani terhadap ketetapan hukum yaitu sebesar 63% atau 27 responden mempersepsikan bahwa penetapan hukum yang berlaku pada pengelolaan HKM dikawasan pela dirasa tidak memberikan dampak negatif bagi petani sehingga petani setuju dengan ketetapan hukum yang berlaku sebagai syarat dalam mengelola hutan.

Pada indikator persepsi petani terhadap masa berlaku izin dan persepsi petani terhadap hak dan kewajiban yakni sebesar 65% atau sebanyak 28 responden menyetujui masa berlaku izin yang telah ditetapkan. Jangka waktu 35 tahun sudah terbilang sangat cukup dan tidak ada yang merasa diberatkan mengenai hak dan kewajiban yang ditetapkan.

Pada indikator persepsi petani terhadap sanksi pelanggaran yakni sebesar 67% atau 29 menanggapi bahwa sebagian besar petani tidak merasa keberatan terhadap peraturan yang ditetapkan pemerintah karena menurut petani peraturan yang ditetapkan tidak begitu sulit untuk dilaksanakan. Kutipan pembicaraan responden terhadap pertanyaan mengenai pemberian izin *“kami menerima peraturan apapun yang tetapkan oleh pemerintah asalkan tidak merugikan kami sebagai petani dan kami bisa tetap menanam di lahan hutan untuk menyambung hidup”*.

Rencana Kerja Pengelolaan HKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi petani terhadap pemberian yang meliputi: rencana pemanfaatan HKM, penataan hutan dan rencana operasional berada pada kategori Baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 10. Persepsi Petani Terhadap Rencana Kerja Pengelolaan HKm Di Desa Pela Kecamatan Monta Kabupaten Bima 2022.

No.	Rencana Kerja Pengelolaan HKm	Kategori						Total	
		Baik (3)		Kurang Baik (2)		Tidak Baik (1)		Jmlh	%
		Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%		
1.	Rencana Pemanfaatan HKm	26	60	17	40	-	-	43	100
2.	Penataan Hutan (Penetapan Areal Kerja, Rencana Penanaman, Rencana Pemeliharaan dan Rencana Perlindungan	26	60	17	40	-	-	43	100
3.	Rencana Operasional (Kegiatan-Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan Dan Target Yang Akan Dicapai Dalam jangka waktu 1 Tahun)	26	60	17	40	-	-	43	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa persepsi petani terhadap rencana pemanfaatan HKm yakni sebesar 60% atau 26 responden menunjukkan bahwa petani sangat mendukung rencana pengelolaan yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh lembaga pengelola Hutan Masyarakat terutama jika ada dukungan dari pemerintah yang bersifat kontinu. Petani beranggapan bahwa dengan adanya pengelolaan hutan yang didukung oleh pemerintah dapat lebih cepat dan akan memberikan dampak positif terhadap kehidupan petani, terutama dari segi peningkatan ekonomi rumah tangga.

Pada indikator persepsi petani terhadap penataan hutan dan rencana operasional yakni sebesar 60% atau 26 responden mengatakan bahwa rencana penatan dan rencana operasional cukup menguntungkan para petani sehingga para petani pun cukup berpartisipasi dalam merealisasikan hal tersebut. Rencana kerja yang dilaksanakan pada kawasan HKm di kawasan pela adalah menanam tanaman penunjang pokok seperti jagung dan bawang, menerapkan pola tanam tumpang sari di areal kerja yang diharuskan pemerintah untuk menjaga ekosistem hutan, kemudian bergotong royong membangun jalan di areal hutan untuk mempermudah akses menuju areal kerja petani.

Pembinaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi petani terhadap pembinaan yang meliputi: meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola organisasi kelompok, membimbing petani dalam mengajukan permohonan izin pemanfaatan areal kerja HKm, meningkatkan kemampuan petani dalam menyusun rencana kerja pemanfaatan HKm dan meningkatkan kemampuan petani dalam mengembangkan keterampilan dalam mengelola hutan berada pada Baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11. Persepsi Petani Terhadap Pembinaan Pengelolaan HKm Di Desa Pela Kecamatan Monta Kabupaten Bima 2022.

No.	Pembinaan	Kategori						Total	
		Baik (3)		Kurang Baik (2)		Tidak Baik (1)		Jmlh	%
		Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%		
1.	Meningkatkan Kemampuan Petani Dalam Mengelola Organisasi Kelompok	29	67	14	33	-	-	43	100
2.	Membimbing Petani Dalam Mengajukan Permohonan Izin Pemanfaatan Areal Kerja HKm	29	67	14	33	-	-	43	100
3.	Meningkatkan Kemampuan Petani Dalam Menyusun Rencana Kerja Pemanfaatan HKm	29	67	14	33	-	-	43	100
4.	Meningkatkan Kemampuan Petani dalam mengembangkan keterampilan dalam mengelola Hutan	29	67	14	33	-	-	43	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa persepsi petani terhadap meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola organisasi kelompok yakni sebesar 67% atau 29 berpersepsi bahwa pembinaan yang dilakukan pendamping selama terbentuknya kelompok sudah cukup baik. Hal ini dikarenakan penyuluh menyampaikan segala sesuatu mengenai masalah pertanian yang dibutuhkan oleh para petani sehingga para petani tidak merasa kekurangan informasi yang dibutuhkan. Dengan adanya pendamping petani lebih mudah dalam berkomunikasi dalam artian petani akan lebih mudah lagi untuk memecahkan masalahnya dalam kegiatan usahataniya serta hal-hal lain yang menyangkut pengelolaan HKm.

Pada indikator persepsi petani terhadap membimbing petani dalam mengajukan permohonan izin pemanfaatan areal kerja HKm yaitu sebesar 67% atau 27 responden berpendapat bahwa tingkat pengetahuan petani dalam pembuatan izin pengelolaan HKm masih kurang. Keinginan petani untuk memperoleh izin sangat tinggi namun tidak didukung oleh kemampuan yang memadai. Pemahaman petani hanya sebatas jika ingin memperoleh izin harus mengajukan proposal dan sejenisnya. Oleh karena itu, pendamping kelompok memiliki peran sangat penting untuk membina dan memfasilitasi anggota kelompok dalam mengajukan permohonan izin pemanfaatan HKm. Menurut petani, dengan adanya penempatan pendamping di desa sebagai fasilitator yang dapat membantu dan memberi arahan untuk petani cukup membantu petani dalam melakukan berbagai hal seperti pengajuan permohonan izin tersebut. Dengan tersedianya fasilitator, petani memiliki tempat untuk bertanya dan mengetahui lebih banyak hal lewat pendamping kelompok.

Pada indikator persepsi petani terhadap meningkatkan kemampuan petani dalam menyusun rencana kerja pemanfaatan HKm yakni sebesar 67% atau 29 responden berpersepsi bahwa pendamping mampu menjadi fasilitator bagi petani untuk menyusun sebuah rencana kerja pemanfaatan HKm. Selain sebagai fasilitator, pendamping juga memberikan arahan untuk meningkatkan daya minat agar berkeinginan hidup mandiri. Sehingga petani bisa mengetahui bahwa penyusunan rencana rencana kerja pemanfaatan HKm membutuhkan pendamping agar program tersebut terarah dan petani bisa memahami tentang HKm.

Pada indikator persepsi petani terhadap meningkatkan kemampuan petani dalam mengembangkan keterampilan dalam mengelola hutan yakni sebesar 67% atau 29 responden mempersepsikan bahwa peran pendamping merupakan hal yang sangat penting dalam mensukseskan program pengelolaan HKm serta meningkatkan kesejahteraan petani dengan memfasilitasi dan memberikan pendampingan serta motivasi kepada petani. Adanya pendamping mampu mempermudah petani untuk meningkatkan pemahaman petani tentang tata cara pengelolaan HKm yang baik.

Sikap Petani Terhadap Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan

Sikap dalam pengkajian ini terdiri dari dua indikator yaitu model konservasi pelestarian dan regulasi pemerintah. Setiap responden memiliki jawaban yang hampir sama dalam pertanyaan mengenai pengelolaan hutan kemasyarakatan. Selanjutnya responden diminta memberikan jawaban atau respon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, lalu dilakukan perhitungan jumlah skor pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kategori tingkat persepsi dibagi menjadi 3 yaitu: setuju, kurang setuju dan tidak setuju.

Berikut ini disajikan hasil capaian skor Sikap Petani Terhadap Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Di Desa Pela Kecamatan Monta. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12. Sikap Petani Terhadap Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Di Desa Pela Kecamatan Monta Kabupaten Bima 2022.

No.	Indikator Sikap	Capaian Skor
1.	Model konservasi pelestarian	10
2.	Regulasi pemerintah	10
Jumlah		20
Kategori		Setuju

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan penjumlahan skor pertanyaan untuk sikap petani terhadap pengelolaan Hutan Kemasyarakatan didapatkan skor sebanyak 20 yang artinya persepsi petani berada pada kategori setuju. Dengan tingkat sikap petani yang berada pada kategori setuju, maka dapat dikatakan bahwa petani mendukung pengembangan dari pengelolaan hutan kemasyarakatan dan petani memahami pentingnya pengembangan tersebut untuk laju pertumbuhan kehidupan sosial dan ekonomi petani.

Model Konservasi Pelestarian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap petani terhadap model konservasi pelestarian yang meliputi: pembukaan areal hutan sebagai lahan tanaman semusim, penerapan pola tanam tumpang sari pada areal kerja HKm, menjaga dan mempertahankan kesuburan tanah dan mencegah terjadinya bencana alam berada pada kategori Setuju. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13. Sikap Petani Terhadap Model Konservasi Pelestarian Dalam Pengelolaan HKm Di Desa Pela Kecamatan Monta Kabupaten Bima 2022.

No.	Model Konservasi Pelestarian	Kategori						Total	
		Setuju (3)		Kurang Setuju (2)		Tidak Setuju (1)		Jmlh	%
		Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%		
1.	Pembukaan Areal Hutan Sebagai Lahan Tanaman Semusim	43	100	-	-	-	-	43	100
2.	Penerapan Pola Tanam Tumpang Sari Pada Areal Kerja HKm	8	19	26	60	9	21	43	100
3.	Menjaga Dan Mempertahankan Kesuburan Tanah	30	70	13	30	-	-	43	100
4.	Mencegah Terjadinya Bencana Alam	10	23	32	75	1	2	43	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa untuk sikap petani terhadap pembukaan areal hutan sebagai lahan tanaman semusim yakni sebesar 100% atau 43 responden mengatakan bahwa seluruh anggota kelompok tani membudidayakan tanaman semusim seperti jagung dan bawang pada lahan yang digarap. Menurut petani, tanaman semusim dapat dengan cepat memberikan pemasukan atau pendapatan.

Pada indikator sikap petani terhadap penerapan pola tanam tumpang sari pada areal kerja HKm yakni sebesar 26% atau 26 beranggapan bahwa penerapan pola tanam tumpang sari pada lahan pertanian memang cukup bagus namun petani merasa dengan menerapkan pola tanam tersebut akan mengurangi kapasitas lahan untuk tanaman semusim yang menjadi tanaman pokok yang dibudidayakan terutama bagi petani yang menanam jagung. Hal tersebut terjadi karena minimnya pengetahuan petani mengenai manfaat dan fungsi dari pola tanam tumpang sari itu sendiri.

Pada indikator sikap petani terhadap menjaga dan mempertahankan kesuburan tanah yakni sebesar 70% atau 30 responden merasa bahwa masyarakat setempat cukup memperhatikan mengenai kesuburan tanah karena sebagian masyarakat bekerja sebagai petani sehingga kesuburan tanah pada lahan pertanian menjadi sangat penting.

Pada indikator sikap petani terhadap mencegah terjadinya bencana alam yakni sebesar 75% atau 32 responden merasakan sejauh ini masyarakat setempat sudah cukup menjaga

lingkungannya. Namun, Maraknya terjadi kasus illegal logging (penebangan liar) yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab menjadi salah satu pemicu besar terjadinya bencana alam di Desa Pela seperti tanah longsor, banjir dan kebakaran hutan, angin kencang beserta hujan, menyebabkan banjir dan memporak-porakan rumah warga yang berada di sekitar aliran sungai lebih khususnya banjir bandang yang terjadi pada 2 tahun belakangan ini..

Regulasi Pemerintah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap petani terhadap regulasi pemerintah yang meliputi: bentuk kerjasama kelompok dengan pemerintah, sistem pengelolaan memberi keuntungan secara sosial terhadap anggota kelompok, sistem pengelolaan memberi keuntungan secara ekonomi anggota kelompok dan mengurangi tingkat eksploitasi hutan yang dilakukan oleh masyarakat berada pada kategori Kurang Setuju. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13. Sikap petani Terhadap Regulasi Pemerintah dalam pengelolaan HKm Di Desa Pela Kecamatan Monta Kabupaten Bima 2022.

No.	Regulasi Pemerintah	Kategori						Total	
		Baik (3)		Kurang Baik (2)		Tidak Baik (1)		Jmlh	%
		Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%		
1.	Bentuk Kerjasama Kelompok Dengan Pemerintah	6	14	27	63	10	23	43	100
2.	Sistem Pengelolaan Memberi Keuntungan Secara Sosial Terhadap Anggota Kelompok	37	86	6	14	-	-	43	100
3.	Sistem Pengelolaan Memberi Keuntungan Secara Ekonomi Anggota Kelompok	28	65	15	35	-	-	43	100
4.	Mengurangi Tingkat Eksploitasi Hutan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat	5	12	22	51	16	37	43	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sikap petani terhadap bentuk kerjasama kelompok dengan pemerintah yakni sebesar 63% atau 27 merasakan peran pemerintah dalam

memberdayakan petani dalam meningkatkan fungsi dan manfaat pengelolaan hutan kemasyarakatan guna menunjang kegiatan pertanian di kawasan pala terbilang sudah cukup baik namun masih belum ada program yang terealisasi seperti pembagian bibit pohon untuk ditanam pada lahan pertanian di kawasan hutan.

Pada indikator sikap petani terhadap sistem pengelolaan memberi keuntungan secara sosial terhadap anggota kelompok yakni sebesar 86% atau 37 responden bahwa masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani tani Wadu Me'e bisa saling membantu dan mempererat silaturahmi antar sesama anggota kelompok maupun dengan pendamping.

Pada indikator sikap petani terhadap sistem pengelolaan memberi keuntungan secara ekonomi terhadap anggota kelompok yakni sebesar 65% atau 28 responden menanggapi bahwa keberadaan hutan kemasyarakatan di wilayah desa pala akan memberikan dampak positif bagi peningkatan perekonomian masyarakat sekitar, pemerintah memberikan akses kepada masyarakat untuk menggunakan lahan secara produktif dan dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem pada wilayah hutan sehingga akhirnya mampu mendorong peningkatan ekonomi bagi para petani.

Pada indikator sikap petani terhadap mengurangi tingkat eksploitasi hutan yang dilakukan oleh masyarakat yaitu sebesar 51% atau 22 merasakan bahwa penanganan terhadap kasus eksploitasi hutan seperti illegal logging masih belum bisa tertuntaskan dengan baik karena masih banyaknya kasus-kasus serupa yang terjadi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan serta mengacu pada tujuan penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi petani terhadap pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Pela berada pada kategori Baik. Petani menyambut positif terhadap keberadaan HKm di Desa Pela. Hal tersebut menjadikan petani sangat kooperatif dan bersedia untuk diajak kerjasama untuk mengelola HKm pada Desa Pela.
2. Sikap petani terhadap pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Pela berada pada kategori Setuju. Keberadaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Pela memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial dan ekonomi petani dengan fasilitas yang tersedia guna meningkatkan fungsi dan manfaat pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dalam menunjang kegiatan pertanian di Desa Pela.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Diharapkan kepada pemerintah agar memberikan kebijakan dalam HKm berupa sebuah model pengelolaan yang dapat mendukung tercapainya pengelolaan hutan untuk kepentingan ekonomi masyarakat sekitar hutan di Desa Pela dengan tetap menjaga keberlanjutan dan kelestarian hutan sesuai dengan tujuan program HKm itu sendiri.
2. Diharapkan kepada lembaga terkait untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pola tanam yang baik dalam menjaga kelestarian hutan.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa agar dapat mencari faktor-faktor apa saja yang memengaruhi persepsi maupun sikap petani terhadap pengelolaan HKm.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim & Nurhidayat Ari Moenir. 2017. Panduan Pelaksanaan ToT Kader SHK Melalui Kelompok Tani Hutan. Bogor. Konsorsium KpSHK.
- Ahmad Nopan Martapani, Hamdani Fauzi, dan Muhammad Naparin. 2021. *Dampak Hutan Kemasyarakatan Terhadap Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat*. Vol. 01, No. 01, Mei 2021 (35-46).
- Ahyar. 2017. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Madapangga Rompu Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bima.
- Ali, *et al.* 2018. Persepsi Petani Terhadap Kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan Di Desa Talumelito Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. Agronesia.
- Almilia, L.Spica. dan D. Wijayanto. 2007. Pengaruh Environmental Performance dan Environmental Disclosure Terhadap Economic Performance. Depok: Proceedings The Accounting Confrence.
- Arief, A. 2001. Hutan dan Kehutanan. Yogyakarta : Kanisius.
- Arrozi, A.M dan Saptana. 2013. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dalam mendukung ketahanan pangan di Provinsi Banten. Prosiding Semir Nasional Optimalisasi Sumberdaya Lokal melalui Diversifikasi Pangan Menuju Kemandirian Pangan dan Perbaikan Gizi Masyarakat Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN. PSEKP Bogor. hal 519-531.
- Azwar, Saifudin (1988). Sikap Manusia. Yogyakarta: Liberty.
- Badan Pusat Statistika Kabupaten Bima. 2020. Kecamatan Monta Dalam Angka. Kabupaten Bima: CV. Maharani.
- Berkowitz, A. 2013. Patofisiologi Klinik Disertai Contoh Kasus Klinik, Diterjemahkan oleh Andry Hartono, Halaman 108. Tangerang: Bina rupa Aksara.
- Brendler T, Carey H. 1998. Community Forestry, Defined. Journal Forestry Vol. 96 No. 3 March dalam National Community Forestry Center. 2000. What is Community Forestry and Why Does It Matter. Noerthern Forest Region. August.
- Depertemen Kehutanan Nomor 41/1999 pasal 24 Tentang Pemanfaatan Kawasan Hutan.
- Didik, S. 2000. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Diniyati, D. dan S.A. Awang. 2010. Kebijakan Penentuan Bentuk Insentif Pengembangan Hutan Rakyat di Wilayah Gunung Sawal, Ciamis dengan Metoda

- AHP. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 7 No. 2:129-143. Bogor: Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan.
- Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. 2021. Statistika Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2021. Mataram: Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi NTB.
- Duinker P N, Matakala P W, Chege F, Bouthillier L. 1994. An Overview. The Forestry Chronicle Excerpt from. Canada: Community Forestry.
- Dwi Sudarsono dan Gunanto. 2009. Panduan Memfasilitasi Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan, Yayasan Masyarakat Nusa Tenggara (Samanta) dan MFP-Kehati.
- FAO (Food and Agriculture Organization). 1976. A Framework for Land Evaluation. FAO Soil Bulletin 52. Soil Resources Management and Conservation Service Land and Water Development Division.
- FAO (Food and Agriculture Organization). 2000. Non-Wood Forest Products and Income Generation. Rome: FAO Corporate Document Repository. Department of Forestry FAO.
- Hadidja, Golar,& Sudhartono, A. 2016. Rencana Pembangun Hutan Kemasyarakatan. Jurnal Warta Rimba, 4(2), 8291.
- Hidayat, Wahyu. 2016. Implikasi Hukum Perumahan Yang Dibangun Di Atas Lahan Pertanian Akibat Alih Fungsi Lahan Di Kabupaten Jennepono. Makassar.
- Iqbal, Muhammad, dkk. 2021. Pemberdayaan ekonomi petani jagung dengan pendekatan agroforestri. Bima.
- Khaeruddin. 2018. Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Nandika, D. 2005. Hutan Bagi Kehutanan Nasional. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Nazir M. 2014. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Noor, dkk. 2006. Panduan Pengenalan Mangrove di Indonesia. Bogor: Wetland International Indonesia Programme dan Ditjen PHKA.
- Pamulardi, Bambang. 2013 Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan, cet. 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 234-235.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1990. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Purwanto, Heri. 1998. Pengantar Perilaku Manusia. Jakarta: EGC.
- Rahmat, S. 2005. Peluang dan Tantangan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di

Provinsi Lampung. Hasil Penelitian, Buletin Kampung. Watala, Lampung.

Rahmat, Al Fauzi. 2021. Diakom: Jurnal Media dan Komunikasi | Vol. 4 No. 2, 2623-1212. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Rahmat, Jallaludin. 1990. Psikologi Komunikasi, hlm. 64. Bandung: Remaja Karya.
Manyamsari, I. & Mujiburrahmad. 2014. Karakteristik petani dan Hubungannya dengan kompetensi lahan sempit. Bogor, Jawa Barat. Agriseip. 3(2): 48-74.

Masria, Golar, dan Ihsan, M. (2015). 1) , 2) , 2). WARTA RIMBA, 3(2), 57–64.

Miftah Thoha. 2002. Perilaku Organisasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mrai yana, Rita. 2010. Pengelolaan Lingkungan Belajar. Jakarta: Kencana.

Riwandi. 2011. *Metode Cepat Penilaian Kesehatan Tanah Dengan Indikator Kinerja Tanah*. Prosiding Seminar Bidang Ilmu Pertanian, Hal 295-315.

Ruandha, Agung, dkk. 2018. *Status Hutan Dan Kehutanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia.

Sajogyo, Pudjiwati. 1999. Sosiologi Pedesaan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Sarwono, Sarlito W. 2007. Psikologi Remaja. Jakarta: Penerbit PT.Raja Grafindo Persada.

Siregar, Arifin. (1992). Sikap dan Perilaku Siswa Kelompok Etnis Keturunan Cina dalam Asimilasi Kebudayaan. Tesis tidak dipublikasikan. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana TKIP Jakarta..

Stephen, P.Robbins, 2009. Manajemen, Jilid 1. Edisi Kesepuluh: Penerbit Erlangga.
Sonny sumarsono. 2003. Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan. Yogyakarta: Graha Ilmuh. H,4.

Suningsih. 2008. Buku Ajaran Silvikultur. Yogyakarta: Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada.

Sugiyarto, 2000. Keanekaragaman Makrofauna Tanah pada berbagai umur tegakan sengon di RPH Jatirejo Kabupaten Kediri. Biodiversitas. 1(20): 11-15.

Suhendang, E. 2002. Pengaturan Ilmu Kehutanan. Bogor: Yayasan Penerbitan Fakultas Kehutanan IPB. Bogor.

Sukirno, S. (2010). Makroekonomi: Teori Pengantar. Edisi Ketiga. Raja Grafindo. Jakarta.

Sumardi, Suryabrata. 2013. Psikologi Pendidikan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Syafa'at, N. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efisiensi Teknis Relatif Dan Sikap Petani Dalam Menghadapi Resiko Produksi Pada Usahatani 102 Padi

Sawah Di Lahan Beririgasi Teknis. Bogor: Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian.

Syamsul Abidin, Sudirman Muin, H.A. Oramahi. 2016. *Sikap Masyarakat Terhadap Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Di Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu*. Vol. 4 (2) : 193-204.

Sys, C. 1985. Land Evaluation Part I, II, III. State University of Ghent. 352 p.

Syafrezani, Sampaguita. 2009. *Manfaat Tumbuhan Bunga Penghias Pekarangan*. hal.12. Bandung:Titian Ilmu. ISBN 978-979-027-105-1

Terry, George R. 2012. Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara. Wolf, E. R.1985. Petani dalam Tinjauan Antropologis. Jakarta: Rajawali Press. Zamroni. 2013. Pendidikan Demokrasi. Yogyakarta: Ombak.